

**KEDUDUKAN GOLDEN VISA DALAM PERMENKUHAM  
NOMOR 82 TAHUN 2023 BERDASARKAN HUKUM  
ADMINISTRASI NEGARA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**YUNI MAHARANI NUR FAHMI**

**202010115179**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : KEDUDUKAN GOLDEN VISA DALAM  
PERMENKUHAM NOMOR 82 TAHUN 2023  
BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI  
NEGARA

Nama Mahasiswa : YUNI MAHARANI NUR FAHMI

Nomor Induk Mahasiswa : 2020101175179

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H

NIDN : 0326078902

Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN : 0304058306

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : KEDUDUKAN GOLDEN VISA DALAM  
PERMENKUHAM NOMOR 82 TAHUN  
2023 BERDASARKAN HUKUM  
ADMINISTRASI NEGARA  
Nama Mahasiswa : YUNI MAHARANI NUR FAHMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 2020101175179  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum  
Tanggal Lulus Sidang Skripsi : **29 Januari 2024**

Jakarta, Februari 2024

MENGESAHKAN


Ketua Penguji : **Dr. Hotma P Sibiuea, S.H., M.H**  
NIDK. 8937370023

Penguji I : **Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H**  
NIDN. 0326078902


Penguji II : **Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H**  
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
**Diana Fitriana, S.H., M.H**  
NIDN . 0424039003

Dekan  
Fakultas Hukum

  
**Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H**  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : KEDUDUKAN GOLDEN VISA DALAM  
PERMENKUHAM NOMOR 82 TAHUN  
2023 BERDASARKAN HUKUM  
ADMINISTRASI NEGARA

Nama Mahasiswa : YUNI MAHARANI NUR FAHMI

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115179

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Kedudukan Golden Visa Dalam Permenkuham Nomor 82 Tahun 2023 Berdasarkan Hukum Administrasi Negara.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Yuni Maharani Nur Fahmi

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNI MAHARANI NUR FAHMI

NPM : 202010115179

TTL : Bekasi, 25 Juni 1995

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“KEDUDUKAN GOLDEN VISA DALAM PERMENKUHAM NOMOR 82 TAHUN 2023 BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Yuni Maharani Nur Fahmi

## ABSTRAK

Program *Residency by Investment* (RBI) atau Skema Izin Tinggal melalui Investasi yang juga dikenal sebagai program "*Golden Visa*" telah mendapatkan popularitas di antara negara-negara yang mencari investastor asing. Indonesia telah menetapkan skema Golden Visa melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan *Golden Visa* Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat aturan *Golden Visa* dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan menganalisa penerapan *golden visa* ditinjau dari hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan aturan *Golden Visa* dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 mengatur tentang izin tinggal terbatas bagi investor asing yang melakukan investasi di Indonesia. Sementara itu, Permenkuham Nomor 82 Tahun 2023 mengatur tentang izin tinggal terbatas bagi investor asing yang melakukan investasi di Indonesia. Dalam kedua peraturan tersebut, *Golden Visa* memberikan kemudahan bagi investor asing untuk tinggal dan berinvestasi di Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Analisa penerapan *golden visa* ditinjau dari hukum administrasi negara dapat dilihat dari prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Dengan mempertimbangkan asas-asas legalitas, proporsionalitas, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas, kita dapat memahami bagaimana program ini dapat dijalankan secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi negara yang berlaku.

**Kata Kunci:** Golden Visa, Imigrasi, Investasi Asing

## **ABSTRACT**

*The Residency by Investment (RBI) program, known as the "Golden Visa" scheme, has gained popularity among countries seeking foreign investors. Indonesia has established the Golden Visa scheme through the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2023 Regarding Visas and Residence Permits and further regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 82 Year 2023 Regarding Types and Rates for Non-Tax State Revenue Urgent Needs for Golden Visa Services Applicable to the Ministry of Law and Human Rights. Therefore, this research aims to examine the Golden Visa rules in Permenkumham Number 22 Year 2023 and analyze the Golden Visa application from the administrative law perspective. This research uses a normative juridical method with secondary legal material sources.*

*The study results show that the Golden Visa rules in Permenkumham Number 22 Year 2023 regulate limited stay permits for foreign investors who invest in Indonesia. Meanwhile, Permenkumham Number 82 Year 2023 regulates about limited stay permits for foreign investors who invest in Indonesia. In both regulations, the Golden Visa provides convenience for foreign investors to live and invest in Indonesia with established terms and conditions.*

*The analysis of the application of the Golden Visa from the administrative law perspective can be seen from the principles of Administrative Law. By considering the principles of legality, proportionality, balance, transparency, and accountability, we can understand how this program can be run efficiently and in accordance with the applicable principles of administrative law.*

**Keywords:** *Golden Visa, Immigration, Foreign Investment*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “KEDUDUKAN GOLDEN VISA DALAM PERMENKUHAM NOMOR 82 TAHUN 2023 BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Rahmat Saputra, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkra Jakarta Raya.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Kegunaan Penelitian .....	10
1.5. Kerangka Teoritis .....	10
1.6. Kerangka Konseptual .....	15
1.7. Kerangka Pemikiran .....	17
1.8. Penelitian terdahulu .....	18
1.9. Metode Penelitian .....	23
1.9.1. Jenis Penelitian .....	23
1.9.2. Pendekatan Penelitian .....	23
1.9.3. Sumber Bahan Hukum .....	24
1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	26
1.9.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	26

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Imigrasi .....	27
2.2. Penanaman Modal .....	33
2.3. Aturan Hukum Penanaman Modal Indonesia .....	36

### **BAB III OBJEK PENELITIAN**

3.1. Visa dalam Aturan Keimigrasian.....	42
3.2. Visa dalam Hukum Administrasi Negara .....	45
3.3. Visa Untuk Tujuan Investasi .....	49
3.4. Golden Visa untuk Meningkatkan Investasi di Indonesia .....	57

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Aturan Golden Visa Didalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan Permenkuham Nomor 82 Tahun 2023 .....	61
4.2. Penerapan Golden Visa Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara ...	71

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran .....	78

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah.

Terima Kasih.